

**TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT NELAYAN  
DALAM PENGELOLAAN TERUMBU KARANG  
Studi Kasus : Kegiatan *Coremap* di Sungai Pisang  
Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang**

**TESIS**

Oleh:

**RESI SURIATI  
02209026**



**PROGRAM STUDI ILMU LINGKUNGAN  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ANDALAS  
2005**



Tingkat partisipasi masyarakat nelayan dalam pengelolaan terumbu karang  
(Studi Kasus: Kegiatan *Coremap* di Sungai Pisang  
Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang)

oleh: Resi Suriati

( Di bawah bimbingan Rahmat Syahni dan Abdullah Munzir)

**RINGKASAN**

Pemanfaatan terumbu karang dalam kurun waktu terakhir sebagian cenderung merusak kelestarian sumberdaya alam yang ada didalamnya. Kegiatan pengambilan batu karang untuk dijadikan kapur, fondasi jalan dan bangunan menyebabkan terjadinya pengikisan pantai dan kekeruhan air. Kegiatan lain yang bersifat merusak adalah penangkapan biota dengan menggunakan bahan peledak atau zat kimia beracun (cyanida, potas) yang merebak hampir diseluruh wilayah Indonesia. Kerusakan dan kematian terumbu karang berarti rusaknya habitat berbagai jenis sumberdaya hayati perairan karang. Akibatnya keanekaragaman hayati jadi berkurang, bahkan mungkin beberapa jenis sudah punah tanpa diketahui. Akibat selanjutnya mata pencaharian nelayan dan masyarakat pesisir yang tergantung pada usaha perikanan dan wisata bahari menjadi berkurang. Salah satu program pemerintah yaitu *coremap* (Coral reef rehabilitation and manajement program) ditujukan untuk melakukan rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang.

Tujuan penelitian: 1) Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat nelayan Sungai Pisang terhadap pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang. 2) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat nelayan Sungai Pisang. 3) Mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan pihak nelayan dengan stakeholders lain sebagai wujud partisipasi yang diberikan.



Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2004 di Kelurahan Sungai Pisang yang merupakan basis *coremap*. Data primer dikumpulkan melalui kuisioner terhadap responden yang dipilih secara acak, melalui pengamatan lapangan dan wawancara dengan informan kunci. Data sekunder mengenai kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat, kondisi dan potensi terumbu karang diperoleh dari kelurahan, dan instansi terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat nelayan dalam pengelolaan terumbu karang pada program *coremap* secara keseluruhan yang tergolong kategori tinggi yaitu 48%, kategori sedang 46,1% dan kategori rendah hanya 5,8%. Bila dilihat dari data indikator partisipasi yang tergolong tinggi yaitu, tingkat pengetahuan nelayan tentang terumbu karang, pengetahuan penyebab kerusakan terumbu karang, kehadiran rapat, keikutsertaan membantu tim, kepatuhan tidak merusak terumbu karang dan reaksi terhadap kegiatan yang merusak terumbu karang yang tergolong partisipasi sedang yaitu mengeluarkan pendapat dan reaksi terhadap program secara keseluruhan. Berdasarkan skor indikator partisipasi tinggi dengan persentase responden paling banyak terdapat pada kepatuhan untuk tidak merusak terumbu karang (73,1%). Sedangkan partisipasi tinggi dengan persentase responden paling sedikit adalah reaksi terhadap program *coremap* secara keseluruhan yaitu (21,1%).

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang adalah pendidikan, pendapatan, penyuluhan, mata pencaharian dan berharap bantuan. Dari analisis korelasi berganda hanya tiga variabel yang memiliki hubungan nyata dengan partisipasi yaitu pendidikan, pendapatan dan penyuluhan. Sedangkan dua lagi yaitu mata pencaharian dan berharap bantuan tidak berpengaruh nyata.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di wilayah pesisir terdapat sumberdaya alami yang berlimpah. Sumberdaya tersebut ada yang dapat pulih dan ada yang tidak dapat pulih. Sumberdaya yang dapat pulih misalnya ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang, sumberdaya perikanan sedangkan sumberdaya tidak dapat pulih misalnya minyak, batu bara dan mineral.

Terumbu karang merupakan ekosistem yang mempunyai produktivitas dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Terumbu karang mempunyai fungsi ekologis sebagai penyedia nutrisi bagi biota perairan, pelindung fisik pantai, tempat pemijahan, tempat bermain dan daerah asuhan bagi berbagai biota laut. Berbagai biota dengan nilai ekonomi penting seperti jenis karang, udang karang, alga, teripang dan mutiara ditemukan di sekitar terumbu karang.

Akhir-akhir ini kualitas ekosistem pesisir seperti mangrove, terumbu karang, estuaria cenderung menurun, terutama ekosistem terumbu karang yang terus menerus mendapat tekanan akibat berbagai aktivitas manusia. Aktivitas tersebut antara lain penambangan batu karang untuk bahan bangunan dan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan racun yang tidak hanya mematikan karang namun lebih jauh akan mematikan plasma nutfah di daerah tersebut. Dampaknya terhadap kegiatan penangkapan adalah berkurangnya hasil tangkapan nelayan dan semakin jauhnya lokasi pencarian ikan dari pantai. Indonesia memiliki lebih kurang 75.000 km<sup>2</sup> ekosistem karang yang tersebar diseluruh wilayah pesisir dan laut dan secara umum



kondisi terumbu karang Indonesia berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan/terancam rusak. Dari penelitian yang dilakukan oleh P3O LIPI, 7% terumbu karang dalam kondisi baik, 54% sedang dan 40% rusak berat atau mati.

Kondisi terumbu karang di Sumatera Barat, 75% dari potensi terumbu karang yang ada telah rusak. Tingkat kerusakan terumbu karang di Sumatera Barat menurut Minang Bahari (1998) 74,1% sangat rusak, 22 % rusak dan 3,7% masih bagus. Hasil penelitian (Effendi, 1999) menjelaskan tingkat kerusakan di beberapa pulau kecil di wilayah pesisir Kota Padang pada tahun 1996 sangat tinggi yakni hanya 0,1% terumbu karang yang masih hidup. Hal ini juga dipicu oleh timbulnya red tide (kondisi blooming alga). Pada tahun 1998 tingkat kerusakan sedikit berkurang (setelah red tide) bahkan ada yang mencapai tutupan karang hidup 37,33%.

Faktor utama penyebab kerusakan terumbu karang adalah tingginya ketergantungan terhadap sumberdaya laut sehingga terjadi eksploitasi yang berlebihan. Akan tetapi hal ini juga tidak lepas dari tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi. Menurut Wood (1996) kerusakan terumbu karang disebabkan oleh faktor manusia dan alam. Faktor penyebab tersebut antara lain; pembangunan wilayah pesisir penangkapan ikan yang berlebihan,angkapan ikan dengan cara destruktif/merusak), pencemaran dari laut, sedimen dan pencemaran dari darat.

Untuk menghentikan laju kerusakan terumbu karang yang terus berlangsung maka merupakan kebutuhan yang mendesak untuk menerapkan konservasi dan pengelolaan yang terpadu untuk melindungi terumbu karang dari kerusakan yang semakin parah. Langkah dan kebijakan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah untuk mengurangi ancaman terhadap terumbu karang di Indonesia adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlunya menjaga kelestarian terumbu karang terutama pada masyarakat pesisir yang mempunyai ketergantungan yang tinggi de-

ngan ekosistem terumbu karang.

Konsep pelestarian adalah pemeliharaan dan pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana. Hakekat konsep ini mempunyai dua pengertian, pertama kebutuhan untuk merencanakan pengelolaan sumberdaya yang di dasarkan pada inventarisasi yang akurat; kedua kebutuhan untuk melakukan tindakan perlindungan untuk menjamin agar sumberdaya tidak habis. Penetapan kawasan yang dilindungi merupakan cara terpenting untuk menjamin sumberdaya dilestarikan.

Menurut John., Kathy MacKinnon., Graham Child and Jim Thorsell (1990) ciri-ciri yang menjadi alasan untuk melindungi suatu kawasan adalah; keunikan ekosistem, nilai keterancaman dari ekosistem, tempat yang memiliki keanekaragaman spesies dan faktor rekreasi alam yang dimiliki suatu kawasan. Dengan ciri yang dimiliki tersebut ekosistem terumbu karang sudah seharusnya dijadikan kawasan perlindungan dalam bentuk konservasi, rehabilitasi bagi ekosistem terumbu karang dengan tingkat keterancaman yang tinggi.

Tindakan pengelolaan perlu dilakukan secara terpadu dan menyeluruh yang melibatkan stakeholders di kawasan pesisir. Masyarakat pesisir adalah pelaku utama terhadap upaya pengelolaan sekaligus yang akan menerima dampak positif jika pengelolaan berlangsung dengan baik.

Salah satu program pemerintah dalam pengelolaan terumbu karang adalah COREMAP singkatan dari *Coral Reef Rehabilitation and Management Program* atau Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang. Program ini ditujukan untuk menumbuhkan dan meningkatkan usaha pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang agar sumberdaya laut ini dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan. *Coremap* Fase I dilaksanakan di 10 Propinsi di Indonesia dan salah satunya Propinsi Sumatera Barat yang ditetapkan lokasinya di Kelurahan Sungai Pisang. Pelaksanaan-



nya di mulai sejak akhir tahun 1998.

Alasan dipilihnya Kelurahan Sungai Pisang Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang sebagai basis *Coremap* adalah:

1. Potensi geografis yang dimiliki oleh daerah Sungai Pisang, lokasinya terletak di tepi pantai, bila dikaitkan dengan Undang-Undang Otonomi Daerah No. 22 tahun 1999, daerah Sungai Pisang memiliki 7 buah pulau-pulau kecil dan 10 buah Gosong yang termasuk dalam wilayah pengelolaan tradisionalnya. Pulau-pulau kecilnya sangat kaya akan keanekaragaman terumbu karang.
2. Potensi sumberdaya laut yang ada di perairan Sungai Pisang sangat indah, baik terumbu karang, ikan-ikan karang, rumput laut, padang lamun dan flora serta fauna yang ada di daratan.
3. Potensi ekonomi utama di kelurahan Sungai Pisang adalah sumberdaya laut. Sebagian besar penduduk Sungai Pisang menggantungkan hidup dari sektor perikanan (sebagai nelayan) sehingga menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap sumberdaya laut terutama ekosistem terumbu karang yang sangat kaya dengan keanekaragaman ikannya.

## 1.2 Perumusan Masalah

Didalam pelaksanaan *Coremap* ada 5 langkah penting yang ingin dicapai dalam upaya pelestarian terumbu karang. Lima komponen kegiatan *Coremap* yaitu:

- a. Penyadaran masyarakat (*public awarness*)
- b. Pengelolaan yang berbasis masyarakat
- c. Pengawasan dan penegakan hukum
- d. Pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan
- e. Penelitian, monitoring dan evaluasi

Prinsip utama dalam program ini adalah pengelolaan yang berbasis masyara-

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Partisipasi nelayan secara keseluruhan dari rata-rata tingkat partisipasi dalam pengelolaan terumbu karang tergolong tinggi (78,45%). Jika dilihat dari indikator tingkat partisipasi dengan kategori (rendah, sedang dan tinggi ) maka nelayan dengan kategori rendah sebanyak 5,8%, kategori sedang 46,1% dan kategori tinggi 48,1%.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang terdiri atas tiga faktor yang menunjukkan hubungan yang nyata yaitu pendidikan, pendapatan dan penyuluhan. Sedangkan faktor mata pencaharian dan berharap bantuan tidak menunjukkan hubungan yang nyata dengan tingkat partisipasi.
3. Kegiatan yang telah dilakukan masyarakat nelayan sebagai wujud partisipasi antara lain; keikutsertaan dalam penyuluhan, mengikuti pelatihan dan sosialisasi dari Tim coremap, menghadiri rapat, menjadi bagian anggota/organisasi dan melaksanakan kegiatan MPA (Mata Pencapaian Alternatif). Partisipasi tersebut ada yang dilaksanakan dengan tingkat keberhasilan yang tinggi dan keikutsertaan yang penuh dan ada yang tidak.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Anonim. 2001. Naskah Akademik Pengelolaan Wilayah Pesisir. Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Departemen Kelautan Perikanan . Jakarta.
- Anonim. 2003. Memperkuat partisipasi masyarakat Desa. Institut for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta.hal.27 – 32.
- Anonim. 1996. Teknik rehabilitasi kawasan mangrove/ bakau. Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi lahan . Jakarta.
- Ardarini, Fina. 2002. Kajian Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kondisi Ekosistem Terumbu Karang dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir di Nusa Penida Bali. Tesis. Institut Pertanian Bogor.
- Asri, M. 2000. Peningkatan Usaha Perikanan di Pantai Sumatera Barat. Draft Tesis. PPN. Pascasarjana Unand.
- Burke, L., E. Selig and M. Spalding . 2002. Terumbu Karang yang terancam di Asia Tenggara World Resources Institut. Amerika
- Bengen, D.G. 2003. Format Keterpaduan dan Berkelanjutan dalam pengelolaan Sumberdaya Alam. Warta Pesisir dan Lautan Edisi Khusus 01/2003 hal.3-6 Proyek Pesisir-PKSPL IPB
- Bungin, Burhan. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Chambers, R. 1992 Pra Participatory Rural Appraisal-Memahami Desa secara Partisipatif. Kanisius . Yogyakarta.
- LIPI. 2001. Nasib Terumbu Karang di Tangan Anda. Buku Panduan Lapangan. LIPI. Jakarta.
- LIPI. 2001. Buku Panduan Pengelolaan Berbasis Masyarakat (PBM) COREMAP. Jakarta
- Dahuri, R., J.Rais., S.P.Ginting dan M.J Sitepu. 1996. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perikanan. 1997. Statistik Perikanan (1997). Dirjenkan. Jakarta, 207 hal.